

# TENTANG G30S

Oleh Partono Karnen

Pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diucapkan di depan sidang MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 yang diberi judul "Nawaksara", ditolak oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No.5/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966. MPRS minta kepada Presiden supaya melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G30S beserta epilognya, juga mengenai kemunduran ekonomi dan akhlak.

Keputusan MPRS ini disampaikan oleh Jenderal Nasution selaku Ketua MPRS dengan surat nota No.2/Pimp.MPRS/1966. Kemudian dengan surat No.01/Pres./67 tertanggal 19 Januari 1967 Soekarno memenuhi permintaan Pimpinan MPRS untuk melengkapi Nawaksara tersebut, yang dinamainya dengan "Pelengkap Nawaksara". Tetapi tidaklah sulit untuk menduga bahwa betapa pun baik dan sempurnanya Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara, MPRS tetap saja akan menolaknya. Hal itu tak lain karena susunan keanggotaan DPRGR dan MPRS telah dibentuk sedemikian rupa, sehingga isinya cumalah orang-orang "yes-man" dari penguasa baru pada waktu itu.

Semuanya itu adalah rangkaian penahapan yang sudah matang terencana, untuk suatu pengambil-alihan kekuasaan yang dilakukan secara bertahap dan "penuh kesabaran", yang segala manuver itu berpuncak dengan diterbitkannya Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967. Inilah tahap-tahap yang sudah jelas merupakan "creeping coup d'etat".

Tetapi bila Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara itu dipelajari secara cermat, dengan melihat posisi Soekarno sebagai Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi maka orang akan berpendapat lain dan bukannya menolak mentah-mentah—dengan pandangan penuh curiga—apalagi sampai menuduh Soekarno terlibat dalam G30S itu.

Semua kemungkinan ini dapat dimengerti mengingat Soekarno bukanlah "orang biasa". Ia memiliki kemampuan berpikir jauh

melampaui pikiran orang-orang biasa di negeri ini.

Pada tahun 1930-an Soekarno sudah meramalkan bakal terjadinya perang besar antara ‘blorong-blorong kapitalis’ yang berakhir dengan kemenangan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Ramalan ini bukanlah suatu ramalan-mistik atau klenik belaka, tetapi berdasarkan perhitungan-perhitungan politik serta arah perkembangan sosial-ekonomi yang sangat tepat dan mendalam. Dan untuk menyongsong datangnya kemerdekaan itulah maka Soekarno menggalang kekuatan massa guna mempersiapkan diri merebut kemerdekaan itu dari penjajahan Belanda.

Pendirian politiknya yang anti-kapitalis, anti-kolonialis dan anti-imperialis membuahkan pola pikir yang mendasar dan mengglobal, karena ia memahami dan menyadari betul bahwa kapitalisme-kolonialisme-imperialisme adalah pikiran atau-ide-ide yang bersifat mendunia. Pola pikir inilah antara lain yang tidak mudah dipahami oleh orang-orang biasa pada waktu itu.

### Pandangan dan Pendiriannya Tentang G30S

Ditegaskannya bahwa peristiwa G30S (yang disebutnya dengan istilah “Gestok”) adalah merupakan een rimpel in de oceaan van de revolusi, yang merupakan riak dalam samudera revolusi.

Secara historis-obyektif penglihatan itu sangat masuk akal, tetapi bagi pihak-pihak tertentu (terutama TNI yang merasa terpukul dan dirugikan) dengan entengnya menganggap Soekarno telah “mengecilkan” atau “meremehkan” arti pembunuhan itu, yang kemudian anggapan itu berkembang menjadi tuduhan bahwa Soekarno telah melindungi bahkan terlibat dalam G30S itu.

Soekarno telah mempelajari secara mendalam setiap revolusi yang terjadi di dunia manapun dan dalam zaman kapan pun. Pada saat revolusi Prancis, Amerika, juga Bolsyewik di Rusia—dan terutama revolusi fisik kita di tahun-tahun 1945 hingga 1950—telah berjatuh korban-korban yang tak dapat dihindarkan lagi. Bahkan sebagian kaum intelek kita pun ikut pula menjadi korban penculikan dan pembunuhan, terutama oleh kalangan pemuda yang dianggap mereka tidak setia atau tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam perjuangan melawan Belanda.

Karena itulah Soekarno menyatakan bahwa dalam revolusi, mungkin saja terjadi seorang bapak memakan anaknya sendiri atau seorang anak membunuh bapaknya sendiri.

Pandangan seperti ini memang tidak mudah dipahami oleh orang-orang biasa. Suatu pandangan yang berdimensi historis-empiris, suatu pandangan yang sudah digenangi oleh pengalaman serta perjuangan hidup yang sudah matang.

Dalam Pelengkap Nawaksara antara lain ditegaskan bahwa:

G30S adalah suatu “complete overrompeling” bagi saya.

Dalam pidato 17 Agustus 1966 dan 5 Oktober 1966 saya sudah jelas-jelas mengutuk Gestok. Pada tanggal 17 Agustus 1966 saya berkata: “Sudah terang Gestok kita kutuk! Dan saya mengutuknya pula.” Sudah berulang kali saya katakan dengan jelas dan tandas bahwa siapapun yang bersalah harus dihukum. Untuk itu kubangunkan Mahmillub.

Kemudian tentang bagaimana G30S itu bisa terjadi, Soekarno melanjutkan:

“Penyelidikanku yang seksama menunjukkan bahwa peristiwa G30S itu ditimbulkan oleh pertemuan tiga sebab yaitu:

1. Keblingernya pimpinan PKI
2. Kelihaiian subversi Nekolim
3. Memang adanya oknum-oknum yang tidak benar

Kenapa saya yang diminta pertanggungjawaban atas terjadinya G30S atau yang saya namakan Gestok itu? Tidakkah misalnya Menko Hankam juga bertanggungjawab?”

Demikianlah pandangan dan pendirian Soekarno yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas permintaan MPRS pada waktu itu. Meskipun tiga sebab yang kontemporer itu tidak dijelaskan secara rinci namun apabila direnungkan dengan mendalam—dan dengan pikiran jernih—orang akan mudah memahami dan membenarkan penemuan Soekarno itu.

Tentang keblingernya Pimpinan PKI

Dalam laporannya di depan sidang MPRS pada 7 Maret 1967 Jenderal Soeharto mengajukan pertanyaan: “Dari kenyataan

tidak dan sikap Presiden yang demikian itu, timbullah pertanyaan apakah Presiden tidak telah mengetahui sebelumnya G30S ini, dan bahkan apakah bukan Presiden-lah yang menggerakkan G30S?”

Pertanyaan macam ini mengandung prasangka yang cukup berat seakan-akan Presiden terlibat secara mendalam dalam G30S. Bahkandalam laporan itu Jenderal Soeharto memaparkan fakta-fakta (yang sudah beredar di media) bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 kira-kira jam 8.00 pagi Kolonel Saelan—ajudan merangkap wakil komandan resimen Cakrabirawa—melaporkan pada Presiden di rumah Haryati di Slipi, terutama mengenai adanya penculikan jenderal-jenderal.

Kemudian sewaktu Brigjen Sunarjo (Jaksa Agung Muda) dan AKBP Sumirat (ajudan Presiden) melaporkan situasi yang mereka ketahui, Presiden Soekarno kontan memberikan reaksi dengan pernyataan: “Absolute overrompeling.” Bahkan dilanjutkan pula dengan pertanyaan: “Wat willen julie met mij doen?” (“Apa yang kalian ingin lakukan terhadap saya?”)

Dari reaksi dan pertanyaan itu sebetulnya mudah untuk dipahami bahwa Soekarno memang tak tahu menahu tentang G30S itu.

Kemudian apabila Soekarno menyatakan bahwa pimpinan PKI “keblinger”, maka konstataasi ini tidaklah keliru. Keterlibatan pimpinan PKI dalam G30S ini cukup jelas, terutama bila disimak hasil sidang-sidang tokoh G30S di Mahmillub.

Di sini akan dikutip secara mendetil pengakuan Sudirman tentang keterlibatannya dalam peristiwa itu.

Dalam pernyataan tertulis teranggal 21 Desember 1966 yang dibuat Sudisman, salah seorang anggota Politbiro C.C. PKI atas permintaan para pemeriksanya, yaitu Letkol Ali Said SH, Letkol Durmawel SH dan Letkol Subari SH, antara lain ia menyatakan:

“Saya pribadi terlibat dalam G30S yang gagal. Kegagalan ini berarti pula kegagalan saya dalam memimpin PKI sehingga mendorong menjadi unggulnya pihak lawan politik PKI”.

Juga dalam Pleidooi-nya yang dibacakan di hadapan sidang Mahmillub, Sudisman menyatakan antara lain:

“Dengan mengemukakan tiga faktor tersebut di atas, bukannya saya bermaksud untuk memungkirkan bahwa tokoh-tokoh PKI terlibat langsung dalam G30S. Tidak, sebagaimana telah saya jelaskan tooh-tokoh PKI termasuk saya sendiri, terlibat dalam G30S, tetapi PKI sebagai Partai tidak terlibat dalam G30S.”

Ditambahkan pula olehnya dalam Pleidooi itu: “Jika mau mengetuk rasa keadilan dan peri kemanusiaan sebagai salah satu Sila Panca Sila, maka semestinya harus ada perlakuan yang sama baik terhadap Masyumi/PSI/maupun PKI yaitu memisahkan perbuatan tokoh-tokoh PKI yang terlibat langsung dalam G30S dan PKI sebagai partai yang tidak tahu menahu tentang G30S. Tetapi hal ini tidak terjadi. Bagi saya jelas bahwa hal ini tidak terjadi karena yang berkuasa adalah satu kelas dengan Masyumi/PSI. Menurut hukumnya satu kelas tidak akan melikwidasi kelasnya sendiri dan yang ditempuh adalah jalan kompromi baik dengan jalan abolisi maupun jalan amnesti. Terhadap PKI yang merugikan lawan kelas dari kekuasaan militer sekarang, maka dilakukan likwidasi yang bisa berlangsung sementara dalam artian sejarah”.

Kemudian ia lanjutkan:

“Hati siapa yang tidak ikut memberontak menatap kenyataan, bahwa Presiden Soekarno yang berjasa dalam memodernkan ABRI didongkel, sedangkan pengkhianat Dr. Sumitro yang sudah mengabaikan keadaan finek Indonesia dan pernah mengatur perongrong-an di laur negeri terhadap RI mendapat kehormatan menduduki singgasana penasehat ekonomi Pemerintah. Penkhianat Dr. Sumitro yang sudah terang-terangan ikut serta memimpin pemberontakan membentuk negara di dalam negara RI dinyatakan masalahnya sudah beres (clear) dan pengkhianatannya dianggap tidak ada sedangkan G30S yang jelas-jelas tidak membentuk negara dalam negara tetapi tetap taat pada Presiden/Pangti ABRI Soekarno sudah banyak yang telah dijatuhi hukuman mati. Timbullah pertanyaan, apakah tindakan itu sungguh-sungguh sesuai dengan rasa keadilan rakyat?”

Juga dalam “Kritik Otokritik Perjalanan Partai Komunis Indonesia”, yang dibuat oleh Sudisman, ia dengan jelas mengatakan:

“Pimpinan PKI telah menjalankan avonturisme, yaitu dengan mudah saja tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan organisasi

melibatkan diri ke dalam G30S yang tidak berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi massa rakyat”.

Dari beberapa hal yang dikutip tersebut di atas cukup jelas dan cukup berdasar, apabila Soekarno menyatakan bahwa “Pimpinan PKI keblinger”. Pernyataan ini pun tidak hanya sekedar pernyataan yang kosong, akan tetapi Bung Karno juga mengambil langkah-langkah untuk menghukum mereka yang bersalah.

Dalam Pelengkap Nawaksara yang telah dikutip di depan, dengan tegas beliau menyatakan:

“Saya dalam pidato 17 Agustus 1966, dan dalam pidato 5 Oktober 1966, mengutuk GESTOK. 17 Agustus 1966 saya berkata: “Sudah terang GESTOK kita kutuk! Untuk itu kubangunkan “MAHMILUB”.

Walaupun Soekarno setuju dengan penghukuman terhadap mereka yang bersalah dalam G30S, termasuk Pimpinan PKI yang keblinger itu, akan tetapi itu tidak berarti bahwa Soekarno juga setuju dengan penglikwidasian PKI. Hal ini adalah masalah lain, karena sudah menyangkut idee dan prinsip-prinsip politik beliau. Dalam laporan Jenderal Soeharto mengutip pidato-pidato Bung karno, antara lain:

Gestoknya harus kita hantam, tetapi komunisnya tidak bisa, karena ajaran komunis itu adalah hasil keadaan objektif dalam masyarakat Indonesia seperti halnya Nasionalis dan Agama....”

Dalam pidatonya tanggal 12 Desember 1965 di hadapan para Mahasiswa HMI, Soekarno juga mengatakan:

“Seribu Dewa dari Khayangan tak dapat mematikan NAS mematikan A dan mematikan Kom...” Peruncingannya itu yang harus kita hantam, Gestoknya yang harus kita hantam, tapi Komunya tidak bisa dihantam”.

Antara lain karena pendirian Soekarno yang demikian itulah Jenderal Soeharto beranggapan bahwa “Presiden tidak tegas menyalahkan PKI dan bahkan menguntungkan PKI.”

Bagi mereka yang tidak mengerti, tidak memahami dan tidak mendalami ajaran Soekarno, yang berkembang sejak tahun 1926 dan kemudian mendapatkan kematangan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam bentuk falsafah Pancasila, yang kemudian setelah kembali

kepada UUD 45 pada 5 Juli 1959 terus berkembang dan mengkristal, maka patutlah dikasihani bila adanya orang-orang yang berpendapat seperti di atas.

## Tentang Lihainya Subversi Nekolim

Mudah sekali untuk membuktikan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia tak henti-hentinya disubversi oleh neo-kolonialisme dan imperialisme. Adakalanya mereka gagal tetapi sering pula mereka berhasil.

Pemberontakan PRRI-Permesta telah dibantu secara terang-terangan oleh CIA dengan mendrop persenjataan berat dan ringan di Sumatera Barat dan Pekanbaru. Di Manado dan Indonesia-Timur bahkan dibantu secara fisik oleh tenaga-tenaga CIA yang didatangkan dari Taiwan dan Filipina melalui Clark Airforce Base.

Dan peristiwa Alan Pope tentulah sudah tak asing lagi. Utusan CIA itu tertembak pesawatnya sewaktu membombardir wilayah Ambon, kemudian tertangkap sebelum akhirnya dibawa ke pengadilan.

Mengenai kelihaihan Nekolim ini Soekarno seringkali mengingatkan supaya kita terus menajamkan kewaspadaan terhadap usaha-usaha subversif tersebut. Dalam salah satu pernyataannya di depan rapat Panglima TNI-AD, pada tanggal 28 Mei 1965 telah disampaikan di Markas Besar Ganefo Senayan, Jakarta:

“Oleh karena revolusi kita dianggap paling berbahaya, enemy number one, maka segala usaha mereka ditumpahkan kepada upaya menghancurkan kita serta menghancurkan revolusi kita. Itulah yang harus dimengerti sekarang ini, bahwa we are in the centre dari segala usaha dan aktifitas mereka untuk menghancurkan kita sama sekali.”

Kemudian ditegaskan lagi tentang adanya bukti-bukti nyata dari mereka, tentang adanya plan-plan yang hendak menghantam kita. Semua plan itu bukan saja propaganda lewat radio atau surat-kabar yang jelas-jelas menyatakan anti-kita, tetapi sekaligus suatu rencana untuk mengadakan gempuran kepada kita. Dan salah satu plan itu adalah upaya untuk membunuh beberapa pemimpin Indonesia terutama Soekarno, Yani dan Soebandrio.

Upaya pembunuhan itu akan dilaksanakan setelah Konferensi Asia Afrika di Aljazair yang disebut sebagai limited attack on Indonesia. Dalam plan itu pun tertulis bahwa mereka punya mitra dari kalangan bangsa Indonesia yang akan bertindak menjadi kaki-tangan mereka, yang kemudian berupaya membantu untuk ikutserta menggulingkan Soekarno, Yani dan Soebandrio.

Kemudian Soekarno pun menandakan:

“Nah Saudara-saudara, sebagai pokok dan tiang dari ketahanan nasional kita, baik Soebandrio maupun Jenderal Yani sudah menekankan: Jagalah persatuan kita, jagalah poros Nasakom! Sebab seperti yang sudah saya katakan bahwa sejak 1922 mereka selalu menggunakan slogan ‘anti-komunis’. Dan sekarang bahwa Soekarno itu komunis, Cipto Mangunkusumo itu komunis. Dan sekarang seluruh orang Indonesia adalah komunis, Yani komunis, Soebandrio komunis dan seterusnya...’

Secara mendetil Soekarno pun melanjutkan bahwa yang dimaksud jiwa Nasakom adalah jiwa persatuan atau semangat persatuan. Ia tidak membedakan apakah komandannya seorang Nasionalis, ataukah staf dan deputinya seorang Agamis atau Komunis. Semuanya diusahakan supaya bersatu, jangan phobi-phobian terutama di kalangan Angkatan Perang baik darat-udara ataupun laut.

“Kalau kita menyuburkan kephobian (kefanatikan) di antara kita, itu adalah jalan mulus bagi pihak imperialis untuk melancarkan gerakan subversifnya, terutama untuk mengadakan adu-domba dan perpecahan di antara kita. Maka saya anjurkan supaya kita pegang-teguh jiwa Nasakom itu... atau jiwa anti phobi-phobian itu...”

Seorang profesor Amerika pada Universitas California Berkeley, Peter Dale Scott, dalam tulisannya yang berjudul, “Amerika Serikat dan Penggulingan Sukarno 1965-1967”, antara lain menjelaskan dengan panjang-lebar:

“Sesudah kegagalan pemberontakan PRRI-Permesta di daerah yang disponsori CIA pada tanggal 1 Agustus 1958, AS mulai meningkatkan program bantuan militer kepada Indonesia dalam bilangan dua puluh juta dolar setahun, sebuah nota kepala Staf gabungan AS tahun 1958 menjelaskan bantuan ini diberikan



kepada AS Indonesia (“satu-satunya kekuatan nono komunis... dengan kemampuan untuk menghambat PKI”) sebagai “dorongan kepada Nasution untuk melaksanakan rencananya untuk mengendalikan PKI/Komunis.

Kepala Staf Gabungan tidak menganggap perlu merinci “rencan” Nasution, yang diacu oleh dokumen-dokumen lain. Itu hanya mengandung makna taktik berkat jasa-jasa Nasution (di mata AS) selam pembunuhan masal, dan penangkapan masal, yang paling sedikit kader partai, mungkin sesudah suatu provokasi tentara. Nasution memberi informasi tentang hal ini pada bulan Nopember 1965, sesudah pembantaian GESTAPU ketika ia menuntut pemusnahan total PKI, “sampai keakar-akarnya”.

Sekalipun demikian pada tahun 1958 PKI muncul sebagai gerakan massa terbesar di negeri ini. Pada periode inilah sekelompok peneliti akademik AS dalam “Think-tanks” yang disponsori AU-AS dan CIA memaksakan kontak dalam tentara Indonesia secara terang-terangan, sering melalui jurnal ilmiah dan pers, agar mengambil alih kekuasaan dan menghabisi oposisi PKI. Contoh paling mencolok adalah Guy Pauker yang pada tahun 1958 baik memberi kuliah di Universitas California, Berkelly maupun bertindak sebagai Konsultan RAND CORP. Dalam kedudukannya yang tersebut belakangan ini ia sering memlihara hubungan dengan apa yang dinamakan “suatu kelompok sangat kecil” intelektual PSI dan teman-teman mereka di AD.

Dalam buku Rand Corp yang diterbitkan Universitas Princeton Press, Pauker mendesak rekanan dalam tubuh militer Indonesia untuk mengambil alih tanggungjawab penuh dalam kepemimpinan Nasional mereka “melaksanakan suatu misi” dan untuk itu “menyerang dan menyapu bersih rumahnya.”

Kawan-kawan terdekat di AD Indonesia adalah Jenderal Sowarto yang dilatih di AS, dan berperan penting mengubah tentara dari fungsi revolusinya menjadi kontra pemberontakan. Tahun-tahun sesudah 1958 Suwarto membangun Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat menjadi tempat berlatih untuk mengambil alih kekuasaan politik. Dalam periode ini SESKOAD menjadi pusat perhatian Pentagon, SIA, RAND, dan (secara tidak langsung) Yayasan Ford.

Di bawah bimbingan Nasution dan Suwanto, SESKOAD telah mengembangkan suatu doktrin strategis baru, ialah perang Teritorial (dalam sebuah dokumen dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris oleh Pauker), yang memberikan prioritas kepada kontra pemberontakan sebagai peran tentara. Khususnya sesudah tahun 1962, ketika pemerintahan Kennedy membantu AD Indonesia mengembangkan Civic Mision atau program “Civic Mision”, ini berarti organisasi infrastruktur politiknya sendiri, atau “Organisasi Teritorial” yang dalam beberapa hal sampai mencapai tingkat desa. Sebagai hasil rekomendasi resmi Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1952 yang penulisannya dibantu oleh Pauker, sebuah kelompok penasehat pelatihan Militer (MILTAG) AS khusus didirikan di Jakarta untuk membantu penerapan program-program Civic Mision SESKOAD.

SESKOAD juga melatih para perwira militer dalam ilmu ekonomi dan pemerintahan, jadi sebenarnya menyelenggarakan para pemerintahan, lepas dari pemerintah Soekarno. Jadi tentara mulai bekerjasama, dan bahkan menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan AS dan asing lain dalam bidang-bidang yang sekarang di bawah kekuasaannya. Program pelatihan ini dipercayakan kepada para Perwira dan orang-orang sipil yang akrab dengan PSI.

Pejabat-pejabat AS memberikan konfirmasi bahwa orang-orang sipil, yang sedang dalam program pelatihan yang didanai oleh Yayasan Ford, terlibat dalam apa yang (pada waktu) dikatakan oleh atase pertahanan AS sebagai “perencanaan kemungkinan” untuk mencegah pengambil alihan oleh PKI.

Fokus yang paling berarti pelatihan dan bantuan AS adalah hubungan yang meningkat antara organisasi Teritorial dengan pemerintah sipil, organisasi keagamaan dan budaya, kelompok Pemuda, Veteran, serikat kerja, organisasi petani, partai politik dan kelompok-kelompok tingkat lokal dan Wilayah. Hubungan politis dengan kelompok sipil ini memberikan struktur penindasan PKI yang zalim, pada tahun 1965, termasuk pertumpahan darahnya.

Tidak lama kemudian kader tentara dan sipil bersama-sama merancang kegiatan yang mengacaukan seperti kerusuhan anti

Tionghoa di Bandung pada bulan Mei 1963, yang tidak hanya memalukan PKI, tetapi juga Soekarno pribadi. Laporan Chomsky dan Herman mengatakan bahwa program-program anti Tionghoa yang didalangi AD terjadi di Jawa Barat pada tahun 1959 dan didanai oleh bantuan AS kepada Komandan tentara setempat.

Rupanya dana CIA dimanfaatkan oleh Komandan (Kolonel Kosasih) untuk membayar begundal-begundal setempat dalam apa yang dinamakan “Mazingo”, suatu kampanye tentara (dan unguin orang-orang Amerika) untuk merobek-robek hubungan dengan Cina. Kerusuhan tahun 1963 yang terjadi dalam bayangan SESKOAD oleh Sundhaussen dikaitkan dalam organisasi “Civic Mision” tentara, dan menampilkan kontak konspiratif antar unsur (suatu sel PSI bawah tanah, kelompok Mahasiswa yang berafiliasi dengan PSI dan Masyumi, dan organisasi “Civic Mision” Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Ishak Djuarsa) yang semuanya menjadi menonjol dalam tahap awal apa yang dinamakan “respons” Soeharto terhadap GESTAPU.

Kerusuhan bulan Mei 1963 diulangi pada Oktober 1965 dan Januari 1966 (khususnya di Bandung), ketika hubungan antara Mahasiswa dengan tentara sebagian besar ditangani perwira-perwira yang cenderung mendukung PSI seperti Sarwo Edhi dan Kemal Idris. Direktorat perencanaan CIA memberikan simpati kepada pembiasan yang meningkat dari operasi yang mengatasnamakan anti PKI ke suatu yang menyulitkan Soekarno. Perubahan ini tidaklah mengherankan karena Suwanto, Kema Idris dan PSI mencolok dalam Coup yang nyaris terjadi (yang dinamakan “peristiwa Lubis”) pada tahun 1956.

Suwanto telah meningkatkan pengembangan seorang siswa baru, yaitu Kol. Soeharto yang masuk SESKOAD pada bulan Oktober 1959. Menurut Sundhaussen, seorang sarjana yang relatif pro Soeharto, pada awal tahun 1960-an Soeharto terlibat dalam penyusunan Doktrin Perang Teritorial Wilayah dan Kebijakan AD dalam Civic Mision (yaitu: Penetrasi Perwira Militer dalam segala kegiatan dan tanggungjawab pemerintahan).

Pusat dair citra umum tentang GESTAPU dan respons Soeharto adalah fakta yang banyak ditayangkan bahwa Soeharto, tidak seperti gurunya Suwanto, maupun Achmad Wiranatakusuma yang lama

menjadi kepala stafnya, tidak pernah belajar di AS namun, keterlibatannya dalam program Civic Mision (atau apa yang dinamakan orang Amerika “civic action) menempatkan dirinya dalam jajaran para Perwira yang cenderung ke PSI, dalam titik perhatian kegiatan pelatihan AS di Indonesia, dalam suatu program terang-terangan bersifat politis.

Penghalusan Doktrin Perang Wilayah dan Civic Mision ke Doktrin strategis baru untuk intervensi politik militer pada tahun 1965 menjadi proses ideologis mengkonsolidasi militer untuk mengambil alih kekuatan politik sesudah peristiwa GESTAPU, ketika Suwarta penasihat politik yang penting bagi mantan siswanya di SESKOAD, Soeharto, maka Doktrin strategisnya membenarkan pernyataan Soeharto 15 Agustus 1966 dalam meminta desakan secara umum maupun pribadi Pauker bahwa militer harus memegang peranan penting di segala bidang.

Itulah sebabnya mengapa diadakan pertemuan tentara pada bulan Januari 1965, sesudah Soeharto secara munafik mendesak Nasution agar bersikap lebih lunak terhadap Soekarno yang hekekatnya langkah yang perlu diambil dalam proses agar Soeharto secara efektif dapat mengambil alih dari saingannya Nasution dan Yani. Ini mengantarkan ke Seminar pada bulan April 1965 di SESKOAD menuju kompromi Doktrin strategis militer, Tri Ubaya Cakti, yang menandakan tuntutan tentara akan peranan politik yang bebas.

Soeharto, pada 15 Agustus 1966, dalam pidatonya kepada Bangsa Indonesia membenarkan keunggulannya yang meningkat dalam wacana “Misi Revolusioner Doktrin Tri Ubaya Cakti. Dua minggu kemudiandi SESKOAD doktrin itu direvisi atas anjuran Soeharto, tetapi dalam tatanan “secara seksama digubah oleh Brigadaer Jenderal Suwarta” agar makin jelas memuat tekanan Pauker pada “civic mision” tentara atau peranan kontra revolusinya. “Civic Mision” ini yang begitu penting bagi Soeharto juga menjadi sasaran dan hasil utama bantuan militer AS kepada Indonesia.

Selain itu, pada bulan Agustus 1964, Soeharto mengawali kontak politiknya dengan Malaysia, oleh sebab itu akhirnya dengan Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Walaupun tujuan awal kontak-kontak ini mungkin untuk menghindari perang dengan Malaysia, namun Sundhaussen memberi kesan bahwa alasan Soeharto adalah

kekhawatirannya diperkuat oleh laporan intelejen KOSTRAD pada pertengahan 1964 tentang kemajuan politik PKI.

Mrazek mengkaitkan penajakan perdamaian dengan ditariknya mundur “beberapa kesatuan terbaik” ke Jawa dalam musim panas 1963. Gerakan ini bersamaan dengan pengembangan yang lebih dini di sebuah Batalyon divisi Diponegoro, yang secara politis disangsikan, ke arah berlawanan dapat juga ditanggapi sebagai mengambil alih kekuasaan.

Dalam catatan Jepang dilaporkan oleh Nishihara, manta personal PRRI/Permesta dengan hubungan Intelejen di Jepang menonjol dalam negosiasi bersama pejabat Jepang. Nishihara juga mendengar bahwa seorang sekutu akrab dari orang-orang ini, Jan Walandouw, yang bertindak sebagai penghubung CIA untuk pemberontakan 1958, di kemudian hari “mengunjungi Washington dan mendukung Soeharto sebagai Pemimpin 66. Saya memperoleh informasi yang dapat dipercaya bahwa kunjungan Walandouw ke Washington untuk kepentingan Soeharto terjadi beberapa bulan sebelum GESTAPU.”

Selain peranan Amerika dengan CIA-nya, Soekarno pun mencanangkan “Dwikora” sehubungan dengan pemaksaan imperialisme Inggris yang menyatakan Sarawak dan Brunei ke dalam “Proyek Malaysia”. Karena itu sangatlah mungkin bahwa MIG (intelejen Inggris) ikut-serta melancarkan subversi kepada Republik Indonesia. Kemudian campur-tangan KGB (Uni Sovyet) karena adanya pandangan bahwa orientasi PKI lebih condong ke RRT daripada ke Uni Sovyet. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa pihak intelejen Jerman dan Jepang pun tidaklah sedikit perannya.

Jadi sangatlah bisa dimengerti mengapa dalam Pelengkap Nawaksara Soekarno menegaskan bahwa salah satu unsur penyebab timbulnya G30S adalah “kelihaihan Subversi Nekolim”.

### Tentang Adanya Oknum-oknum yang Tidak Benar

Masalah oknum-oknum ini sangat erat kaitannya dengan subversi Nekolim, terutama mengenai orang-orang menjadi kaki-tangan Nekolim yang tugasnya ikut menggerogoti dan mengkhianati

revolusi Indonesia. Kini laporan-laporan dari CIA dan Kedutaan Amerika sudah banyak menunjukkan bukti-bukti serta kisah-kisah yang menggambarkan hubungan antara agen-agen intelejen dengan oknum-oknum Indonesia itu.

Dalam laporan-laporan itu, meski sulit untuk menetapkan siapa orang-orang Indonesia yang suka memberikan informasi kepada “bos-bosnya”, tetapi secara logika tidaklah mungkin orang-orang CIA itu mendapatkan bahan-bahan laporan yang akurat—meski tidak jarang meleset—kalau bukan dari informan atau agen-agensya di Indonesia.

Mengenai soal spionase ini, sebetulnya dalam Rapat Panglima sejak 28 Mei 1965 Soekarno sudah mewanti-wanti memperingatkan:

“Saudara-saudara dari Angkatan Bersenjata, terutama dari Angkatan Darat, ketahuilah bahwa pada saat-saat ini kita sedang menghadapi situasi yang paling serius terutama dalam mempertahankan revolusi Indonesia ini. Rencana-rencana musuh yang amat tajam dalam menjalankan pengintaian dan subversi serta spionase, kini sudah ada di kantong kita. Ketahuilah saudara-saudara bahwa sistem spionase mereka adalah yang paling tangguh dan paling sempurna di dunia. Karena itu mungkin saja mereka sudah mengetahui setiap tindakanku, setiap tindakan Suprpto, Mursyid, Adji dan lain-lain. Maka jangan tinggal diam, saudara-saudara... Kita harus tahu bahwa hasil dari plot-plot kita menunjukkan they are preparing an attack on Indonesia, they are going to try to kill Soekarno, Yani and Soebandrio... kami sudah tahu semuanya bahwa they are going to make a limited attack on Indonesia, they have their friends here. Karena itu tegakkan perjuangan, janganlah kita gentar. Ini adalah perjuangan besar negara-revolusi terhadap imperialisme, yang masih merupakan mata-rantai perjuangan kecil yang telah saya jalankan sebagai pribadi dalam melawan penjajahan Belanda... sekali lagi janganlah gentar, saudara-saudara....”

Dalam bukunya yang berjudul, “Gestapu, Dua Jalur CIA di Indonesia”, David T. Johnson (Research Director Center for Defense Information Washington) antara lain menyatakan:

“Amerika selama bertahun-tahun telah membangun hubungan erat dengan banyak orang Indonesia, terutama di kalangan Angkatan Darat.

Sesungguhnya, ini adalah hakekat kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia selama lima tahun atau lebih sebelumnya. Kesamaan kepentingan Amerika Serikat dan Angkatan Darat yang anti PKI akan membuat pola yang wajar dan semata-mata merupakan kelanjutan pola yang sudah ada, suatu kolaborasi dan pengumpulan sumber daya untuk melaksanakan sarana terbaik yang tersedia untuk menghentikan PKI dan “menyelamatkan” Indonesia. CIA, menyediakan sejumlah keahlian dan kemampuan teknis untuk merancang dan melaksanakan manuver yang relatif canggih dan halus”.

Dalam bagian lain ia mengatakan:

“Desas-desus “Dewan Jenderal” yang seringkali dianggap sebagai produk pekerjaan PKI, mungkin sekali merupakan unsur penting dari operasi terselubung CIA-Soeharto dalam mempersiapkan dasar bagi GESTAPU”.

Selanjutnya dikatakan:

“Agaknya mungkin sekali bahwa pengadilan atas Omar Dhani dan Subandrio terutama dimaksudkan sebagai batu loncatan dalam kampanye untuk menyingkirkan Soekarno dan kurang menjadi bagian dari cerita GESTAPU yang bertujuan untuk menutup-nutupi. Pengadilan terhadap Sjam tahun 1968-lah yang secara jelas sudah diperhitungkan akan menimbulkan pengaruh kepada orang-orang asing yang bersikap skeptis. Tentu Soeharto juga mempunyai alasan-alasan lain untuk melanjutkan pengadilan-pengadilan sandiwara itu”.

Dikatakan pula, bahwa:

“barulah pada siang hari “pilihan nama-nama yang agak aneh” yang didudukkan dalam Dewan Revolusi diumumkan. Tetapi indikasi mengenai dibubarkannya Kabinet yang ada, tampaknya sebagai dimaksud untuk memberikan alasan dan polesan legalitas bagi Jenderal Soeharto untuk mengambil alih Komando Angkatan Darat dengan cepat tanpa konsultasi dengan Soekarno”.

Demikian pula Kathy Kadane yang menulis buku berjudul: ”Para Mantan Aagen berkata “CIA menyusun daftar kematian kematian di Indonesia” antara lain menulis:

“Setelah diam seribu bahasa selama seperempat abad, Mantan Diplomat Senior Amerika Serikat dan para perwira CIA

menceritakan secara panjang lebar dalam suatu wawancara bagaimana mereka membantu Presiden Indonesia Soeharto, yang waktu itu pimpinan Angkatan Darat, membasmi PKI.”

Selanjutnya dikatakan:

“Persetujuan untuk diberikannya daftar nama-nama itu datang dari para pejabat puncak Kedutaan Besar Amerika Serikat, termasuk mantan Duta Besar Marshall Green, Deputy Kepala Misi Jack Lydman dan Kepala Bagian Politik Edward Masters”.

“Saya tahu kami mempunyai informasi yang jauh lebih banyak mengenai PKI daripada orang Indonesia sendiri”, demikian kata Green (Marshall Green). Martens berkata kepada saya bahwa dalam sejumlah peristiwa Pemerintah tidak mempunyai informasi yang baik mengenai rekayasa Komunis, dan dia memberi saya kesan bahwa informasi tersebut lebih unggul daripada segala sesuatu yang dipunyai Pemerintah”.

“Daftar nanam itu diberikan sedikit demi sedikit, demikian kata Martens dimulai dari pucuk pimpinan organisasi Komunis. Martens memasok ribuan nama kepada seorang utusan Indonesia selama beberapa bulan, demikian Martens meneruskan. Utusan itu adalah Ajudan Adam Malik, seorang Menteri Indonesia, sekutu Soeharto dalam membasmi komunis.

Diwawancarai di Jakarta, Ajudan tersebut, Tirta Kencana (“Kim”) Adhyatma, memperkuat keterangan, bahwa ia telah bertemu dengan Martens dan menerima daftar ribuan nama yang selanjutnya ia berikan kepada Malik. Malik kemudian meneruskannya ke Markas Besar Soeharto, demikian dia berkata”.

Dari uraian panjang di atas kiranya dapatlah dimengerti mengapa Soekarno mengemukakan bahwa “mereka punya spionase yang amat teliti dan tajam”. Dan kini jelaslah pula mengapa dalam Pelengkap Nawaksara Soekarno menyatakan tentang “adanya oknum-oknum yang tidak benar.”

Selain itu dalam bukunya yang berjudul, “Kehormatan Bagi Yang Berhak”, Manai Sophiaan menyampaikan bukti-bukti lain yang sangat mendukung:

“... bahwa Geoffrey Robinson mengutip sebuah telegram dari



Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 21 Januari 1965 yang ditujukan kepada Department of State (DOS) di Washington, dan dilaporkan tentang adanya pertemuan yang baru saja diadakan antara seorang pejabat kedutaan besar dengan Jenderal S. Parman yang mengungkapkan kuatnya “peranan dalam Angkatan Darat” terhadap pengambilan-alihan kekuasaan sebelum meninggalnya Soekarno. Angkatan Darat, menurut telegram itu, sangat prihatin terhadap gerakan PKI untuk membangun Angkatan ke V, karena itu merasa perlu mengambil tindakan langsung untuk “mengimabngi gerakan PKI.” Angkatan Darat menyadari bahwa bagaimanapun, tidak ada kup terhadap Soekarno yang akan berhasil.

Oleh karena itu dianjurkan supaya kup dilakukan demiiian rupa, sekan-akan menjaga kepemimpinan Soekarno tetap utuh”.

“Seperti diuraikan dalam Bab VI, Gabriel Kolko, yang menulis tentang Indonesia dengan mengutip dokumen-dokumen Kementerian Luar negeri Amerika Serikat dan CIA yang tidak dirahasiakan lagi mengenai debat tentang perana Amerika Serikat di Indonesia tahun 1965 mengatakan tentang adanya telegram dari Duta Besar amerika Serikat di Jakarta, Howard Jones 22 Januari 1965. Dengan menghilangkan anam orangnya dalam telegram, orang iu menerangkan kepada saya (Duta Besar) berita yang sangat rahasia bahwa tentara mengembangkan rencana spesifik untuk mengambil alih kekuasaan pada saat Soekarno akan turun tahta. Orang itu baru datang dari pertemuan dengan Jenderal S. Parman yang mendiskusikan rencana itu dengannya.

Ia berkata, sekalipun telah ada rencana-rencana tentang Contingency (kemungkinan) basis dengan perhatian pada post Soekarno era, terdapatlah suatu sentimen kuat di antara segmen top Military Command untuk mengambil alih kekuasaan sebelum Soekarno turun”.

Dengan mengemukakan hal-hal tersebut, Manai Sophiaan menarik kesimpulan, bahwa:

“Dapat dipercaya, bagaimanapun dirahasiakannya, Presiden Soekarno menerima laporan mengenai kegiatan-kegiatan ini melalui jalur khusus, sehingga cukup alasan baginya, untuk mengatakan bahwa salah satu sebab terjadinya G30S, karena “adanya oknum-oknum yang tidak benar”.

Dan ironisnya MPRS sama sekali tidak menanggapi apa yang

dikemukakan Soekarno dalam Pelengkap Nawaksara itu. Keputusan pimpinan MPRS No.13/B/1967 tanggal 16 Februari 1967 hanya berisi satu diktum: menolak Pelengkap Nawaksara yang disampaikan dengan Surat Presiden No.5/MPRS/1966, kemudian dalam konsiderannya hanya tercantum:

“Bahwa Surat Presiden No.01/Pres/67 tanggal 10 Januari 1967 tentang Pelengkap Nawaksara tidak memenuhi makna yang termaksud dalam Keputusan MPRS No.5/MPRS/1966 tersebut.”

Keputusan MPRS No.5/MPRS/1966 itu sendiri membuat konsiderans sebagai berikut:

“Bahwa keseluruhan pidato Presiden/Mandataris MPRS yang disampaikan kepada MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul NAWAKSARA, yang meliputi batang tubuh laporan dan lampiran-lampirannya, kurang memenuhi harapan rakyat, khususnya anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, karena tidak memuat secara jelas pertanggung-jawaban tentang kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa kontra-revolusi G30S/PKI beserta epilognya.

Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dalam melakukan penilaian terhadap pidato tersebut, tidak dapat melepaskan diri dari keadaan kehidupan sosial-politik sebelum dan sesudah 1 Oktober 1965 yang menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, khususnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia”.

Sudah dapat diperkirakan bahwa pertanggung-jawaban Presiden/Mandataris MPRS bagaimanapun baiknya, akan ditolak oleh MPRS yang susunan sudah “di-redress” oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution, sehingga hanya merupakan “yes-men” belaka. MPRS tidak akan mau dan mampu menanggapi Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara, apalagi menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bung Karno tentang usaha-usaha pembunuhan yang sampai 7 kali terhadap beliau itu.

Penolakan Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara hanya merupakan satu tahap saja dari suatu skenario untuk menggulingkan Soekarno “secara Konstitusional”. Rekalanya dengan menggunakan hukum

konstitusi itulah yang ditempuh oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution untuk menjatuhkan Soekarno sehingga tidak terlalu kelihatan bahwa sebenarnya telah dilakukan coup d'etat terhadap Bung Karno. Cara yang ditempuh adalah cara “creeping coup d'etat”, dengan penuh kesabaran menggunakan perangkat hukum konstitusi.

Sungguh lihai memang “oknum-oknum yang tidak benar” itu!

### Proses Penahanan yang Tidak Transparan

Bukti-bukti konkret yang menyatakan Soekarno ditahan memang sulit diperoleh, sehingga sulitlah untuk diketahui mengapa penahanan itu bisa terjadi, apa dasar-dasar penahanan itu, sampai berapa lama, serta siapa yang menandatangani surat penahanan itu.

Tetapi yang nyata-nyata terjadi adalah bahwa setelah dicabut mandatnya sebagai Mandataris MPRS oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967, langsung ia diisolasi dan ditempatkan di suatu tempat tertentu, dari Istana Bogor kemudian diisolasi-ketat di Wisma Yaso (yang sekarang dipergunakan sebagai Museum Satya Mandala) Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Salah seorang anggota Tim Perawat, Prof. Dr. Mahar Mardjono menulis suatu karangan yang berjudul, “Beberapa Kenangan Sebagai Dokter Bung karno”, dalam peringatan 90 tahun Bung Karno pada tanggal 6 April 1991 antara lain dijelaskan dengan panjang-lebar:

“Bung Karno ditempatkan di Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto. Yang diperbolehkan mengunjungi Bung Karno hanya Ibu hartini, Ibu Fatmawati dan putra-putrinya. Segala fasilitas diadakan di Wisma Yaso untuk keperluan pemeriksaan dan perawatan, termasuk alat rontgen, alat-alat kedokteran gigi dan lain-lain. Selanjutnya juga ada beberapa perawat yang secara bergiliran selama 24 jam tiap hari siap untuk memberikan perawatan.

Setelah sekian waktu tidak merawat Bung Karno dr. Sukaman dan saya dimasukkan ke dalam tim yang bertanggungjawab atas kesehatan Bung Karno. Tim kecil tersebut diketuai oleh Mayjen. dr. Rubiono Kertopati dan beranggotakan saya, dr. Sukaman,

Prof. Dr. Utama dan Kol. dr. Hasan dari Kodam. Bila perlu ahli-ahli lain diikutsertakan dalam pemeriksaan dan perawatan. Seorang dokter pribadi datang tiap hari di Wisma Yaso untuk mengecek keadaan kesehatan Bung Karno. Bung Karno dapat jalan-jalan di halaman yang luas, juga disediakan buku-buku, bermacam-macam majalah dan surat kabar dan apabila Bung Karno dapat diputar film di Wisma Yaso. Beberapa kali dokter-dokter diminta menonton film bersama Bung Karno.

Selama di Wisma Yaso pada umumnya Bung Karno dalam keadaan sehat, hanya adakalanya mukanya kelihatan sedih. Kadang-kadang Bung Karno mengeluh: "Apa salah saya, koq saya diperlakukan begini". Kami hanya dapat mendengarkan saja. Saya termasuk dokter yang paling sering diminta datang pada malam hari untuk memeriksa Bung Karno apabila beliau ada keluhan, misalnya pusing atau susah tidur.

Pada suatu malam menjelang pukul 12 saya ditilpon oleh dr. Hasan untuk segera ke Wisma Yaso memeriksa Bung Karno yang mengeluh nyeri kepala. Sesampai di Wisma Yaso saya langsung masuk ke ruang tidur Bung Karno. Waktu saya mendekatinya tiba-tiba Bung Karno merangkul saya, kepalanya diletakkan di pundak saya sambil menangis tersedu-sedu. Waktu saya tanya ada apa, beliau sambil menangis mengatakan dalam bahasa Belanda: "Jij bent de enige die mij kan helpen. Ik kan het niet meer uithouden. Ik wil toch ook graag eens uitgaan, de stad zien". Artinya: "Kamu orang satu-satunya yang dapat menolong saya. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya kan juga ingin jalan-jalan, melihat kota". Saya waktu itu menjanjikan untuk merusak permintaannya ke Ketua tim dokter. Memang dalam rapat tim saya sampaikan keinginan Bung Karno, namun sebagai dapat dipahami permintaannya tidak dapat dikabulkan karena alasan keamanan.

Dengan Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No.KEP-034/KOPKAM/10/1968 tertanggal 20 Oktober 1968 yang atas nama Pangkoptambtib ditandatangani oleh Jenderal M. Panggabean dibentuk tim kesehatan baru untuk memeriksa dan merawat Bung Karno. Tim tersebut terdiri dari saya sebagai Ketua, Mayjen. Dr. Rubiono Kertopati sebagai wakil ketua dan dr. Sukaman (kardiolog), Brigjen. Dr. Djaka Sutadiwiria (sekjen Depkes), dr. Oei Bing Tay (radiolog RSPAD), May. Dr. Soerojo (dr. pribadi) dan prof. Dr. Utama (urolog) sebagai anggota.

Kadang-kadang pemeriksaan kesehatan Bung Karno dilakukan di luar Wisma Yaso, misalnya dalam bulan Juni 1968 di RS. St. Carolus dan dalam bulan April 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Pada waktu itu ahli-ahli lain juga diminta memeriksa Bung Karno, di antaranya dr. Lie kioeng Foei (internis) dan prof. Dr. Nizar (ahli THT).

Dalam tahun 1970 keadaan kesehatan Bung Karno mundur. Bung Karno makin jarang mau bicara, tidak banyak jalan dan keinginan membaca berkurang. Pada tanggal 16 Juni 1970 pukul 8 malam Bung Karno dirawat di RSPAD, karena keadaan kesehatannya makin mundur. Beliau sadar, mau makan, namun merasa lemah. Pemeriksaan lengkap dilakukan dan tim dokter tiap hari siap siaga. Dari keluarga Bung Karno yang tiap hari hadir mendampingi Bung Karno ialah putrinya Rachmawati dan juga Ibu Hartini. Atas permintaan Bung Karno pemerintah mengizinkan Ibu Dewi dan putrinya Kartika datang ke Indonesia untuk menengok Bung Karno, namun Ibu Dewi baru tiba di Jakarta pada hari Sabtu malam tanggal 20 Juni 1970. Pada waktu Bung Karno sudah tidak sadar. Ibu Dewi masih sempat melihat Bung Karno, akan tetapi sudah tidak ada komunikasi.

Sejak dirawat Bung Karno makin mundur kesehatannya. Kesadarannya berangsur-angsur menurun, walaupun telah diusahakan segala tindakan dan pengobatan. Pada hari Minggu 21 Juni 1970 pukul 4 pagi Bung karno dalam keadaan koma. Saya dan dr. Sukaman terus berada di sampingnya. Menjelang pukul 7 pagi dr. Sukaman sebentar meninggalkan ruang rawat. Saya sendiri berada dalam ruang rawat dengan Bung Karno. Bung Karno berbaring setengah duduk, tiba-tiba beliau membuka mata sedikit, memegang tangan saya dan sesaat kemudian Bung Karno menghembuskan nafas terakhir”.

Selain pernyataan Mahar Mardjono di atas, ada juga beberapa petunjuk terutama mengenai harta-benda Soekarno yang ada di Istana dan tempat-tempat lain. Maka dilakukanlah pencatatan atas perintah-lisan dari kolonel Subono Mantofani, SH tanggal 11 Juli 1968, yang dilaksanakan oleh suatu tim pencatat yang terdiri dari 9 orang, dan kemudian menyelesaikan tugasnya hingga 26 Juli 1968. Waktu itu yang tercatat mulai dari perhiasan-perhiasan hingga pispot, sisir, pakaian, buku-buku dan lain-lain.

Berkas dari barang-barang yang terdaftar itu cukup tebal. Tetapi apakah barang-barang itu kemudian disita atau dimusnahkan, tidak

pernah ada penjelasan sampai sekarang. Dan segala perlakuan itu merupakan petunjuk bahwa terhadap Soekarno telah dilakukan tindakan-tindakan khusus yang tentunya tidak dilakukan terhadap orang-orang biasa yang bebas-merdeka...

Kemudian apabila disimak diktum Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 memang terdapat dua hal penting yang dapat digunakan sebagai “landasan”, yang lantas dijadikan alasan yang sah untuk mengenakan perlakuan-khusus kepada Soekarno, yaitu:

Pasal 1: Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum, dan seterusnya....

Pasal 6: Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya, yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno dilakukan menurut hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Selain itu, dasar lain yang dipergunakan sebagai landasan mengambil tindakan terhadap Soekarno adalah tindakan yang terdapat dalam Konsiderans Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 itu, yaitu:

“Bahwa ada petunjuk-petunjuk, yang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30S/PKI.”

Pada waktu itu memang telah beberapa kali dilakukan pemeriksaan terhadap Soekarno, terutama oleh Jenderal Sunarso, sebagai Komandan CPM (mungkin sekaligus Ketua Team Pemeriksa Pusat–Terpepukopkamtib). Mengenai ini kisah-kisahny sudah disebarluaskan lewat media-media cetak, tetapi hasil pemeriksaan itu tidaklah menghasilkan berita acara (pro-justicia) yang semestinya, yang kemudian memang diperuntukkan untuk mengadili Soekarno. Kabarnya waktu itu sudah dipersiapkan pengadilan dengan terlebih dahulu merancang siapa-siapa Hakim dan Oditurnya.

Rupanya dalam Era Orde Baru, yaitu setelah peristiwa G30S khasanah hukum pidana kita mendapatkan perluasan dalam pengertian tindak pidana, malahan agaknya ada “tindak pidana baru” yaitu yang kira-kira berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesan, bahwa perbuatan itu secara tidak langsung atau langsung menguntungkan G30S/PKI akan dihukum dengan hukuman tahanan tanpa batas waktu atau ditahan sampai mati”.

Pasal tambahan dalam hukum Pidana inilah yang mengakibatkan ratusan ribu, mungkin jutaan orang mengalami penahanan tanpa diadili selama puluhan, belasan tahun dan banyak yang sampai meninggal juga, termasuk Bung Karno. Sebenarnya dalam kenyataan yang menjadi dasar hukumnya adalah “Hukum dan Gregetan”.

Ada yang mengatakan bahwa pemberitahuan tentang penahanan terhadap diri Soekarno itu disampaikan oleh Jenderal M. Panggabean yang saat itu menjabat Pangkopkamtib. Apakah dalam penyampaian berita itu disertai dengan penyampaian Surat Penahanan tidak begitu jelas, akan tetapi pada waktu itu Jenderal M. Panggabean sempat menangis tersedu-sedu.

Pasal 4 Ketetapan MPRS No.XXXIII itu mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden yang menurut pasal 6, Jenderal Soeharto inilah yang disertai penyelesaian secara hukum mengenai diri Dr. Ir. Soekarno. Sebagaimana kita ketahui dan semua maklum dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak ada jabatan “Pejabat Presiden” ini (ini termasuk rekayasa “creeping Coup d’etat” dengan menggunakan hukum konstitusi”), sehingga tentunya yang kuasa dan berwenang untuk bertindak adalah “Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966”, yang isinya adalah “mengukuhkan SP 11 Maret 1966”.

Sejalan dengan logika hukum ini, maka yang “berwenang dan berhak” dan “berani” melakukan tindakan apa saja adalah Jenderal Soeharto dan sehubungan dengan hal ini dapatlah diasumsikan bahwa Jenderal Soehartolah—dengan menggunakan kewenangan yang didasarkan atas bunyi Ketetapan MPRS tersebut—yang melakukan penahanan dan menanda-tangani Surat Penahanan atas diri Bung Karno itu.

Pengalaman juga menunjukkan, bahwa yang melakukan penahanan dan menanda-tangani Surat Penahanan terhadap para Menteri pada

tanggal 18 Maret 1966 (sejumlah 16 Menteri Kabinet) adalah juga Jenderal Soeharto, selaku Pengemban SP 11 Maret 1966.

Penggunaan SP 11 Maret 1966 yang eksekutif ini telah mendapat peringatan sampai dua kali dari Pemberi Surat Perintah itu, yaitu Presiden Soekarno. Pada tanggal 13 Maret 1966, Presiden telah menyampaikan nota kepada Jenderal Soeharto yang dibawa sendiri oleh Waperdam II Dr. Leimena, yang berisi peringatan bahwa Jenderal Soeharto telah “melampaui” wewenang yang diberikan oleh Presiden Soekarno. Karena peringatan itu tidak dihiraukan, maka surat peringatan yang kedua tertanggal 14 Maret 1966 telah pula disampaikan kepada Jenderal Soeharto akan tetapi dengan sikap yang “stubborn” Jenderal Soeharto menjawab, bahwa tindakan yang diambil itu adalah “tanggung-jawabnya sendiri”. Peringatan itu mengandung Penjelasan bahwa SP 11 Maret 1966 hanya mengandung pelaksanaan pengamanan secara teknis saja dan jelas bukan “pelimpahan wewenang pemerintahan”.

Dalam pidato 17 Agustus 1966 oleh Bung Karno yang berjudul “Jangan sekali-kali meninggalkan Sejarah” (Never Leave History) atau yang terkenal dengan “Jas Merah”, Bung Karno menegaskan lagi antara lain, bahwa:

Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejeurus waktu, membuat mereka bertampik sorak sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan! Dikiranya SP 11 Maret itu satu “transfer of authority”. Padahal tidak! SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan, demikian kataku pada waktu melantik Kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan, bukan penyerahan pemerintahan! Bukan “transfer of authority”.

Akhirnya, penggunaan Surat Perintah 11 Maret yang kemudian dimanfaatkan sebagai dasar hukum untuk menahan Soekarno adalah “absurd” dan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Karena surat itu adalah surat perintah yang mestinya ditindaklanjuti “untuk” dan “atasnama” yang memberi perintah. Dan kenyataannya Jenderal Soeharto melakukan penangkapan terhadap para menteri-kabinet sampai membubarkan PKI bertindak



atasnama Presiden/Mandataris MPRS/ Pemimpin Besar Revolusi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menahan Soekarno tentulah Jenderal Soeharto sendiri—dengan memanfaatkan Surat Perintah 11 Maret—atas nama Presiden Soekarno.

Semuanya itu dapat diartikan bahwa Dr.Ir Soekarno secara “formal” telah ditahan oleh Presiden Soekarno, yang artinya pula bahwa Soekarno telah memerintahkan untuk menahan dirinya sendiri. Sungguh aneh bin ajaib....

Jadi jelaslah sekarang bahwa “Konstruksi hukum” yang dipergunakan untuk menahan Soekarno—secara logika yang wajar dan masuk akal—sama sekali tidak dapat di pertanggungjawabkan!

Bila ditinjau dari sudut alasan mengapa Soekarno ditahan, kiranya sandarannya adalah rumusan yang terdapat dalam konsiderans Ketetapan MRS No.XXXIII/MPRS/1967 bahwa “ada petunjuk-petunjuk yang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30S/PKI.

Kemudian: apakah rumusan itu yang menjadi tindak pidana yang dilakukan terhadap Soekarno? Padahal kita semua tahu bahwa kita tidak dapat menciptakan tindak pidana baru yang tidak tertuang dalam undang-undang.

Hal itu tentu saja di larang oleh Hukum, dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita, yang dalam pasal 1 (1) sudah tegas-tegas menyatakan pelarangan tersebut. Dan perlu ditekankan bahwa KUHP kita belum pernah ditambah dengan tindak pidana—yang rumusannya telah digambarkan dalam pasal tersebut.

Oleh karena itu—sekali lagi—bila ditinjau dari sudut kewenangan yang melakukan penahanan serta bila ditinjau dari tindak pidana apa yang dilakukan atas diri Soekarno, maka dapat ditegaskan bahwa penahanan itu secara yuridis tidak benar dan dapat dipertanggungjawabkan!

**MPRS Bersikeras Mencari-cari Kesalahan**

Selain persoalan-persoalan di atas, maka yang dipergunakan MPRS

juga mengenai kebijaksanaan politik Soekarno dalam menyelesaikan masalah G30S—yang menurut MPRS tidak benar.

Telah kita ketahui bersama bahwa Soekarno adalah Presiden pertama Rrepublik Indonesia yang mempersatukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ia menyadari betul bahwa untuk melawan Nekolim harus dipersatukan semua “revolusionaire krachten”. Ia pun mengetahui bahwa antara TNI (terutama Angkatan Darat) dengan PKI terdapat rivalitas yang cukup tajam, padahal keduanya adalah bagian dari revolusionaire krachten tersebut.

Karena itu sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, sebagai bapak terhadap anak-anaknya yang “bertengkar” tentulah Soekarno tidak akan tinggal diam. Ia terus mencari jalan bahkan berusaha mencari solusi yang terbaik, hingga tak henti-hentinya memperingatkan supaya semua pihak jangan saling gontok-gontokan, hindari pertumpahan darah dan perang saudara.

Dalam setiap pidato 17 Agustusan Soekarno tak pernah lupa untuk terus-menerus mengingatkan agar menggalang persatuan dan kesatuan, bahkan pada pidato 17 Agustus yang terakhir, yang disebut sebagai pidato “Jas Merah” antara lain ditegaskan:

“Dalam Resopim telah saya tandaskan tekanan nasionalis kita, cetuskan kekuatan nasional secara total, cetusan isi jiwa nasional sedalam-dalamnya, di mana dwitunggal proklamasi dan deklarasi adalah sasaran tujuan perjuangan kita yang jelas, tandas, terang dan gamblang. Ia adalah pegangan hidup revolusi kita, pandangan hidup, tujuan, falsafah bahkan rahasia dan pengayoman hidup dari revolusi kita. Maka dengan berpegang-teguh pada sejarah itu, dengan mantap dan penuh keyakinan serta menatap dengan cerah harapan-harapan baru, mari kita menggembelng terus semangat persatuan dan kesatuan untuk memperjuangkan kita selanjutnya...”

kemudian dalam pernyataan selanjutnya tak henti-hentinya diserukan penggalangan kekuatan, sebagai berikut:

“Saya gembira dengan kata-kata MPRS yang menentukan penggalangan segala kekuatan progresif-revolusioner, menyatakan anti-imperialisme dan kolonialisme yang harus ditingkatkan realisasinya. Justru itulah yang saya ikhtiarkan, justru itulah yang

saya kerjakan siang-malam, ya justru itulah yang saya anggap sebagai salah satu tugas hidup saya... sebagai salah satu life dedication saya...!”

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa:

“Jiwa Pancasila dan jiwa Nasasos ata Nasa apapun namanya, harus menjadi leitstar dari revolusi modern sekarang ini, yaitu revolusinya umat manusia! Oleh karena itu maka selalu saya mengingatkan kepada bangsa dan rakyatku: jangan gontok-gontokan, jangan sembelih-sembelihan. Karena semua itu akan memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa, memecahkan hakiki dari revolusi kita. Ketahuilah bahwa ratusan ribu pembunuhan, ratusan ribu penahanan, semuanya hanya akan menjadi masalah sosial-politik yang semakin panas dan semakin meningkatkan pertentangan di antara kita...”

Lebih lanjut demi menjaga persatuan-kesatuan ini Soekarno menandaskan:

“Persatuan dan Kesatuan bangsa masih tetap merupakan syarat-mutlak bagi pertumbuhan dan pembangunan dalam bidang materil dan idiiil apapun. Oleh sebab itu lihatlah ke belakang... tidakkah pada masa lalu sebelum kemerdekaan kita, ataupun sesudah kemerdekaan, fakta-fakta menunjukkan dengan jelas bahwa perpecahan hanyalah membawa kita pada keruntuhan semata. Karena itu saudara-saudara, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta... dan masa lampau sangatlah berguna untuk menjadi kaca-bengala dari masa yang akan datang...!”

Maka pertanyaannya kemudian: kelirukah atau salahkah bila Soekarno menjalankan politik yang tetap menggagalkan persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun bada-gelombang tak henti-hentinya mendera Republik kita?

Semua usaha dan jerih-payah itu telah dibalas secara tidak wajar oleh MPRS, dan dalam sidangnya Jenderal Soeharto menyatakan:

“Presiden tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Supardjo yang telah turut dalam kelompok Pimpinan G30S/PKI melakukan penculikan dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat, yang berkedudukan sebaga Menteri dan Pimpinan Angkatan Darat tersebut.”

Selanjutnya dilaporkan juga:

“... Presiden telah berkenan memberikan izin persetujuan kepada Omar Dhani sekeluarga untuk bertempat tinggal di Istana Bogor. Keizinan tersebut diberikan setelah Omar Dhani mengajukan permohonan melalui Penerbang pribadi Presiden (Kolonel Udara Slemat Kardjono) yang dilandasi rasa terancam jiwa diri dan keluarganya sebagai akibat dari sikap dan tindakannya memihak pada G30S/PKI.”

Juga dilaporkan:

“Adapun periode epilog G30S/PKI masih banyak tindakan atau sikap Presiden yang kurang dapat dimengerti atau bahkan menimbulkan persangkaan atau curiga terhadap Presiden, oleh karena seolah-olah Presiden membela atau tetap menguntungkan G30SPKI.”

Laporan berlanjut:

“Presiden Soekarno yang seharusnya sudah dapat bertindak menurut hukum terhadap Omar Dhani dan menyerahkan kepada Panglima KOPKAM, malahan mengizinkan Omar Dhani menginap di Istana Bogor dan kemudian memberikan tugas negara keluar negeri.”

Demikian pula Presiden Soekarno tidak bertindak menurut hukum terhadap Supardjo yang nyata-nyata telah bertindak sebagai Pimpinan dan Pengatur G30S/PKI”

Begitupun terhadap D.N. Aidit Presiden tidak mengambil tindakan hukum.

”Setelah berlangsung Sidang Umum ke IV MPRS yang diharapkan dapat memberikan pengertian pada Presiden tentang apa yang dikehendaki Rakyat, Presiden tetap menunjukan keenganan dan kealpaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusionalnya”.

Presiden sama sekali tidak melakukan langkah-langkah untuk menyalahkan gerakan tersebut ataupun menyingkir dari daerah Halim, untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan untuk menghukumnya/menumpasnya. Bahkan beliau melakukan tindakan yang dapat kita rasakan, seperti menyetujui atau merestui

G30S dengan penunjukan Caker-taker Men/Pangad setelah mendengar saran pertimbangan Supardjo”.

Padahal pada tanggal 2 Oktober pagi hari Soekarno telah “menyingkir” ke Istana Bogor dan pada saatnya baik Omar Dhani maupun Supardjo maupun tokoh-tokoh lain dari G30S diajukan ke Mahmillub.

Hanya orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mendalami sikap hidup dan prinsip-prinsip perjuangan Soekarno yang menomorsatukan Kesatuan dan Persatuan Bangsa sajalah yang dapat mengemukakan pandangan dan pikiran seperti terurai di atas.

Kebijakan Politik Soekarno dalam menghadapi G30S itu—yang tetap berpegang teguh pada prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan tetap menghukum melalui Mahmillub bagi mereka yang bersalah—adalah kebijaksanaan yang sudah benar dan tepat.

Selain itu, meskipun Soekarno sadar akan risiko yang dihadapi karena kebijakan politiknya, ia tetap memegang-teguh prinsip politiknya, terutama tentang Nasakom yang telah ia rintis sejak berusia 25-an tahun.

Mengenai hal ini Jenderal Soeharto—dengan tanpa disadari—memaparkan keteguhan-hati Soekarno, dalam laporannya kepada MPRS sebagai berikut:

“Gestok harus kita hantam, tetapi komunisnya tidak bisa. Karena ajaran komunis adalah hasil keadaan objektif dalam masyarakat Indonesia seperti halnya Nasionalis dan Agamis. Nasakom telah kutulis sejak aku berumur 25 tahun dan dalam tahun 1926. Hal ini akan kupegang-teguh sampai aku masuk ke liang kubur!”

## Beberapa Catatan Untuk Masa Depan Bangsa

Akhirnya, tak mungkin disangsikan lagi bahwa jasa dan pengorbanan Soekarno untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia, akan sulit dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin manapun. Karena itu patutlah untuk dinyatakan bahwa dalam kurun waktu 100 hingga 200 tahun yang akan datang Indonesia yang akan datang indonesia belum tentu mendapatkan seorang pemimpin dan bapak bangsa seperti Soekarno.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghormati dan mengagungkan jasa-jasa pemimpin bangsanya.

Sudah 30 tahun lebih nama baiknya telah dicemarkan, jasa-jasanya telah dilupakan bahkan ajaran-ajarannya yang sangat bermanfaat bagi kepentingan dan pengembangan bangsa telah dilarang dan digelapkan.

Tetapi sejarah tetaplah sejarah. Kiranya sudah tiba saatnya untuk mengembalikan harkat martabat serta harga diri Soekarno. Bangsa Indonesia harus kembali ke jalan yang benar yang ditunjukkan Soekarno melalui ajaran-ajarannya.

Sebagai manusia tentu saja Soekarno tak luput dari kelemahan, kekurangan dan kesalahan, namun bila diimbang-imbang secara obyektif, jujur dan lugas maka jasa-jasa dan pengorbanannya akan jauh lebih besar dari pada kekurangan-kekurangannya.

Karena itu secepatnya Presiden Republik Indonesia—yang memiliki kewenangan sesuai pasal 14 dan 15 jo Perubahan Pertama UUD RI 1945 tentang pasal 14 dan 15—untuk memberikan rehabilitasi serta menganugerahinya sebagai “Pahlawan Nasional”. Selain itu patutlah Presiden RI untuk membebaskan ajaran-ajarannya dari larangan-larangan, serta menganjurkan seluruh rakyat Indonesia untuk kembali mempelajari dan mendalami ajaran-ajaran tersebut.

Dengan memberi rehabilitasi kepada Soekarno berarti pula membersihkan anak-cucu dan seluruh keluarganya, yang selama ini terkena dampaknya, dicaci-maki bahkan dihujat habis-habisan.

Marilah kita mulai berpikir rasional, berjiwa ksatria dan dewasa, untuk bersama-sama menjunjung-tinggi kehormatan bagi yang berhak memperolehnya....

ooo0ooo

Jakarta, akhir Maret 2001